Tahun 2018	Vol. 5	Nomor 1	Periode Januari - Juni	ISSN : 2356-3923
------------	--------	---------	------------------------	------------------

ANALISIS TENTANG KEMANDIRIAN PEMBANGUNAN DAERAH (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013)

Oleh :

MELIA WIDA RAHMAYANI *)

e-mail : meeliawiddott@gmail.com

ABSTRAK

Kemandirian daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya serta mampu untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, sehingga ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang lebih kecil. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Perekonomian Jawa Barat pada tahun 2013 yang ditunjukkan dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tumbuh sebesar 6,06 % dibanding tahun 2012 (BPS, Provinsi Jawa Barat). Peningkatan PAD sebenarnya merupakan eksese dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2003)⁴. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Sejalan dengan upaya untuk memantapkan kemandirian pembangunan daerah yang dinamis dan bertanggung jawab, hal ini tidak lepas dari peran serta para perangkat/pegawai pemerintah daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang banyak berkaitan dengan birokrasi pemerintah daerah yang berhubungan dengan pelayanan publik (*public service*).

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh *tax effort* dan belanja pegawai terhadap kemandirian pembangunan baik secara parsial maupun secara simultan. Metode yang digunakan adalah metode survey dan dirancang sebagai penelitian deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang terdiri 26 Kabupaten/Kota dengan menggunakan teknik sampling *purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *tax effort* dan belanja pegawai baik secara simultan maupun parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian pembangunan daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Kata Kunci : *Tax effort*, Belanja Pegawai dan Kemandirian Pembangunan

*) Dosen Tetap Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Latar Belakang

Diberlakukannya undang-undang tentang otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Implikasi dari kebijakan otonomi daerah tersebut adalah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kepentingan pemerintah daerahnya masing-masing. Misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sekurang-kurangnya ada tiga, yaitu (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, serta (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

PAD inilah sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah, apabila struktur PAD kuat, maka dapat dikatakan daerah tersebut mempunyai kemampuan pembiayaan yang juga kuat sehingga dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

Peningkatan PAD sebenarnya merupakan eksekusi dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2003)⁴. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Pertumbuhan ekonomi adalah proses terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil.

Sejalan dengan upaya untuk memantapkan kemandirian pembangunan daerah yang dinamis dan bertanggung jawab, hal ini tidak lepas dari peran serta para perangkat/pegawai pemerintah

daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang banyak berkaitan dengan birokrasi pemerintah daerah yang berhubungan dengan pelayanan publik (*public service*). Belanja pegawai memberikan pengaruh positif terhadap kemandirian daerah, dimana besarnya belanja pegawai bisa mendorong produktifitas kinerja para perangkat daerah tersebut.

Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah juga berperan dalam hal meningkatkan kemandirian suatu daerah, kemandirian daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dispenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang “Pengaruh *Tax Effort* Dan Belanja Pegawai Terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh *tax effort* dan belanja pegawai terhadap kemandirian pembangunan daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2009 – 2013 baik secara parsial maupun simultan.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh *tax effort* dan belanja pegawai terhadap kemandirian pembangunan daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2009 – 2013.

Kemandirian Daerah

Kemandirian daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi daerah/otonomi fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya serta mampu untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, sehingga ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang lebih kecil.

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan dengan meningkatkan pemerataan dan keadilan.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, rasio ini juga menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Dengan rasio ini akan dapat dilihat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak lain dalam hal ini bantuan dari pemerintah pusat. Rasio ini pun menggambarkan seberapa besar peranan masyarakat dalam pembangunan Abdul Halim¹⁾ (2007 : 232). Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Selain itu juga, semakin tinggi rasio kemandirian maka partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah semakin tinggi.

Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi Abdul Halim¹⁾ (2007:233). Berikut adalah rumus untuk menghitung kemandirian daerah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\% \quad 1)$$

Tax Effort

Tax Effort atau upaya pajak adalah upaya peningkatan pajak daerah yang diukur melalui perbandingan antara hasil penerimaan (realisasi) sumber-sumber PAD dengan potensi sumber-sumber PAD. Upaya pajak menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki. Potensi dalam pengertian ini adalah seberapa besar target yang ditetapkan pemerintah daerah dapat dicapai dalam tahun anggaran daerah tersebut.

Tax Effort merupakan aspek relevan bila dikaitkan dengan tujuan otonomi daerah, yaitu peningkatan kemandirian daerah. Kemandirian daerah seringkali diukur dengan menggunakan PAD, dimana pajak daerah dan retribusi daerah menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi yang sangat besar. Berikut adalah rumus untuk menghitung *tax effort* :

$$\text{Tax Effort} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Potensi PAD}} \quad 2)$$

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pegawai pemerintah, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan,

kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pementukan modal.

Sejalan dengan upaya untuk memantapkan kemandirian pembangunan daerah yang dinamis dan bertanggung jawab hal ini tidak lepas dari peran serta para perangkat/pegawai pemerintah daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang banyak berkaitan dengan birokrasi pemerintah daerah yang berhubungan dengan pelayanan publik (*public service*).

Kemandirian daerah dapat tercapai apabila sistem dalam tatanan pemerintahan berjalan dengan baik, salah satu diantaranya adalah kinerja para perangkat daerah. Belanja pegawai berperan sebagai alat kompensasi yang diberikan kepada perangkat daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan juga sebagai pendorong untuk meningkatkan produktifitas kerja para perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan kemandirian daerah, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan sendiri (PAD) . Pemerintah cenderung menggali potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya (Shamsub dan Akoto⁵), 2004). *Tax Effort* adalah upaya peningkatan pajak daerah yang diukur melalui perbandingan antara hasil penerimaan (realisasi) sumber-sumber PAD dengan potensi sumber-sumber PAD. *Tax Effort* menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki. Potensi dalam pengertian ini adalah seberapa besar target yang ditetapkan pemerintah daerah dapat dicapai dalam tahun anggaran daerah tersebut.

Tax effort diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan potensi PAD, oleh Sukanto R (1999)⁶. Kemandirian daerah seringkali diukur dengan menggunakan PAD, dimana pajak daerah dan retribusi daerah menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi yang sangat besar, dengan kata lain terdapat hubungan yang positif antara upaya pajak dengan kemandirian daerah. Hal ini mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa apabila upaya pajak tersebut naik maka akan dapat meningkatkan jumlah penerimaan daerah, dimana PAD akan mengalami kenaikan sehingga akan menurunkan tingkat ketergantungan daerah.

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pegawai pemerintah, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Belanja pegawai memberikan pengaruh positif terhadap kemandirian daerah, dimana besarnya belanja pegawai bisa mendorong produktifitas kinerja para perangkat daerah tersebut serta menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang banyak berkaitan dengan birokrasi pemerintah daerah yang berhubungan dengan pelayanan public (*pubic service*).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemandirian suatu daerah selain dari pada pendapatan asli daerah yaitu potensi daerah artinya daerah mampu menggali dan mengoptimalkan setiap potensi daerah maupun kapasitas fiskalnya , indikator yang digunakan sebagai tolak ukur dari potensi daerah adalah Produk Regional Bruto, apabila Produk Domestik Regional Bruto mengalami peningkatan dari tahun ke tahun maka PAD suatu daerah mengalami peningkatan.

Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah *Tax Effort* dan Belanja Pegawai berpengaruh terhadap kemandirian pembangunan daerah.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 26 Kabupaten/kota, yang terdiri dari 17 Kabupaten dan 9 kota.

Sampel dari penelitian ini adalah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria sebagai berikut : Kabupaten/Kota yang sudah ada dan tidak mengalami pemekaran dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang telah mempublikasikan data Laporan Realisasi APBD pada Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah secara rutin dari tahun 2009 sampai tahun 2013 melalui situs www.djpk.keu.co.id⁷⁾ ataupun yang dipublikasikan badan pust statistik Jawa Barat melalui situsnya www.Jabar.Bps.go.id.⁸⁾ Kabupaten/kota yang melaporkan realisasi anggaran dari sektor *tax effort* (Pendapatan asli daerah ditambah dana hasil pajak dan bukan pajak), belanja pegawai dan kemandirian pembangunan daerah (Pendapatan asli daerah dibagi total pendapatan) yang digunakan sebagai bahan penelitian ini tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah :

1. *Tax Effort*

Tax effort adalah jumlah pajak yang sungguh-sungguh dikumpulkan oleh kantor pajak dan dilawankan dengan potensi pajak (*tax capacity potensial*). Usaha pajak dapat diartikan sebagai rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak di suatu daerah. Data *Tax Effort* yang digunakan

untuk perhitungan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah ditambah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak secara nyata diperoleh dari sumber penerimaan daerah dan dibandingkan dengan potensi penerimaan daerah yang memungkinkan untuk dikumpulkan. Data *Tax Effort* dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2013.

$$Tax\ Effort = \frac{Realisasi\ PAD}{Potensi\ PAD} \quad 1)$$

Sumber : Saprudin³⁾ (2011)

2. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pegawai pemerintah, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Belanja Pegawai dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2013.

3. Kemandirian Pembangunan Daerah

Kemandirian pembangunan daerah yang diukur dengan menggunakan rasio antara PAD dengan Total Pendapatan Daerah dengan formulasi sebagai berikut : *Rasio Kemandirian* = $\frac{PAD}{Total\ Pendapatan} \times 100\%$ ²⁾
Sumber : (Abdul Halim¹⁾, 2007 : 232)

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan menggunakan Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis.

Tahun 2018	Vol. 5	Nomor 1	Periode Januari - Juni	ISSN : 2356-3923
------------	--------	---------	------------------------	------------------

Hasil Penelitian

Tabel 1.
Hasil Uji Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Effort	95	.21	63.35	4.2566	8.28519
Belanja Pegawai	95	476012.00	2763574245.00	366593318.8632	407695764.61812
Kemandirian Pembangunan Daerah	95	.12	80374.00	4256.9149	12439.40162
Valid N (listwise)	95				

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2015

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variasi data *tax effort*, belanja pegawai, kemandirian tinggi karena standar deviasi melebihi rata-rata.

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients			T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	25.109	1.120		22.416	.000
Tax Effort	-.327	.157	-.096	-2.078	.041
Belanja Pegawai	-1.148	.059	-.904	-19.588	.000

a. Dependent Variable: Kemandirian Pembangunan Daerah

Persamaan Regresi tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut :

$Y = 25.109 - 0,327X_1 - 1,148 X_2$

- a. Nilai konstanta sebesar 25,109 bernilai positif. Artinya jika variabel *tax effort*, dan belanja pegawai bernilai 0 (nol), maka kemandirian pembangunan daerah akan bernilai sesuai dengan nilai konstanta dalam persamaan tersebut yaitu sebesar 25,109.
- b. Nilai koefisien regresi *tax effort* sebesar 0,327 bernilai negatif. Artinya bahwa setiap penambahan 1 satuan pada variabel *tax effort* maka akan menurunkan ketergantungan sebesar 0,327 satuan dengan variabel lain dianggap konstan. Sebaliknya setiap pengurangan 1 satuan pada variabel maka *tax effort* akan meningkatkan ketergantungan 0,327 satuan dengan variabel lain dianggap konstan.
- c. Nilai Koefiseien regresi belanja pegawai sebesar 1,148 bernilai negatif. Artinya bahwa setiap penambahan 1 satuan pada variabel belanja pegawai maka akan menurunkan kemandirian pembangunan daerah sebesar 1,148 satuan dengan variabel lain dianggap konstan. Sebaliknya setiap pengurangan 1 satuan pada variabel maka belanja pegawai akan meningkatkan kemandirian pembangunan daerah sebesar 1,148 satuan dengan variabel lain dianggap konstan.

Tabel 3
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	760.915	2	380.457	191.862	.000 ^b
Residual	182.434	92	1.983		
Total	943.349	94			

a. Dependent Variable: Kemandirian Pembangunan Daerah

b. Predictors: (Constant), Belanja Pegawai, Tax Effort

Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2015

Uji Hipotesis

1. Pengaruh *tax effort* terhadap kemandirian pembangunan daerah

Berdasarkan tabel Hasil Analisis Regresi Linear Berganda menunjukkan t_{hitung} variabel *tax effort* adalah sebesar 2,078 bernilai negatif dengan tingkat signifikansi sebesar 0,041. Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,078 > 1,98$ dan nilai signifikansinya $0,041 > 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian Hipotesis pertama terbukti kebenarannya.

2. Pengaruh belanja pegawai terhadap kemandirian pembangunan daerah

Berdasarkan tabel Hasil Analisis Regresi Linear Berganda menunjukkan t_{hitung} variabel belanja pegawai adalah sebesar 19,588 bernilai negatif dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $19,588 > 1,98$ dan nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Dengan demikian Hipotesis kedua terbukti kebenarannya.

3. Pengaruh *tax effort* dan belanja pegawai terhadap kemandirian pembangunan daerah

Berdasarkan tabel di atas nilai Sig. 0,000 lebih kecil dari probabilitas 0,05 atau $0,000 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $191,862 > 3,09$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti *tax effort*, dan belanja pegawai secara simultan

(bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap kemandirian pembangunan daerah. Dengan demikian Hipotesis ketiga terbukti kebenarannya.

Pembahasan

Pengaruh *Tax Effort* terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah

Secara teori upaya pajak menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki. Potensi dalam pengertian ini adalah seberapa besar target yang ditetapkan pemerintah daerah dapat dicapai dalam tahun anggaran daerah tersebut. Apabila *tax effort* tersebut naik maka akan dapat meningkatkan jumlah penerimaan daerah, dimana PAD akan mengalami kenaikan sehingga akan menurunkan ketergantungan terhadap bantuan pusat. Dengan kondisi seperti itu, maka akan dapat meningkatkan kemandirian daerah.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa apabila *tax effort* naik maka akan menurunkan tingkat ketergantungan dan meningkatkan kemandirian pembangunan daerah. Potensi PAD setiap daerah masih tergolong rendah sehingga pemerintah belum mampu untuk mengoptimalkan potensi tersebut, serta adanya pemisahan pajak daerah dan pajak provinsi yang menyebabkan berkurangnya pendapatan daerah.

Tidak signifikannya pengaruh upaya pajak terhadap kemandirian daerah Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat disebabkan karena usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak yang ada tidak efektif. Efektivitas suatu daerah dalam menggali sumber keuangan, akan sangat tergantung pada kebijakan atau peraturan

yang diambil oleh pemerintahan itu sendiri. Di satu sisi, mobilisasi sumber daya keuangan untuk membiayai berbagai aktivitas daerah ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya. Disisi lain kurang efektifnya pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi pajak sebagai akibat dari terbatasnya sumber daya manusia sehingga kemampuan administrasi pemungutan pajak di daerah menjadi rendah serta kemampuan administrasi perencanaan dan pengawasan yang masih rendah.

Pengaruh Belanja Pegawai terhadap kemandirian pembangunan daerah

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Joko (2005)²⁾ dan Saprudin³⁾ (2011), yang menyatakan bahwa belanja pegawai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian pembangunan daerah.

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pegawai pemerintah, pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja pegawai disatu sisi memberikan pengaruh positif terhadap kemandirian daerah, dimana besarnya belanja pegawai bisa mendorong produktifitas kinerja para perangkat daerah tersebut. Namun di sisi lain, belanja pegawai juga dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap kemandirian daerah, hal ini dikarenakan besarnya belanja pegawai akan mempengaruhi besarnya tingkat pengeluaran daerah yang kemudian dapat membebani stabilitas keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa belanja pegawai berpengaruh terhadap kemandirian pembangunan daerah, meningkatnya belanja pegawai justru dapat mengurangi kemandirian pembangunan daerah sebagai akibat dari alokasi belanja pegawai yang cenderung lebih banyak untuk pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin dapat mengurangi produktivitas daerah dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah (Saprudin³⁾:2011).

Hal ini mengindikasikan bahwa belanja pegawai tidak mampu meningkatkan produktifitas kinerja para perangkat daerah untuk dapat menggali potensi PAD yang akan mempengaruhi kemandirian pembangunan daerah di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

Pengaruh *tax effort* dan belanja pegawai terhadap kemandirian pembangunan daerah

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemandirian suatu daerah selain dari pada PAD yaitu potensi daerah artinya daerah mampu menggali dan mengoptimalkan setiap potensi daerah maupun kapasitas fiskalnya, kemampuan dinas pendapatan daerah juga berperan dalam hal meningkatkan kemandirian suatu daerah kemandirian dapat ditingkatkan melalui perencanaan penerimaan daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengolahan dan analisis data dengan menggunakan regresi linear berganda, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Tax Effort* berpengaruh signifikan terhadap kemandirian pembangunan daerah. Potensi PAD setiap daerah masih tergolong rendah sehingga pemerintah belum mampu untuk mengoptimalkan potensi tersebut,

Tahun 2018	Vol. 5	Nomor 1	Periode Januari - Juni	ISSN : 2356-3923
------------	--------	---------	------------------------	------------------

- serta adanya pemisahan pajak daerah dan pajak provinsi yang menyebabkan berkurangnya pendapatan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat belum mampu untuk menggali dan mengoptimalkan potensi daerah.
2. Belanja Pegawai berpengaruh signifikan terhadap kemandirian pembangunan daerah. Hal ini disebabkan Meningkatnya belanja pegawai justru dapat mengurangi kemandirian pembangunan daerah sebagai akibat dari alokasi belanja pegawai yang cenderung lebih banyak untuk pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin dapat mengurangi produktivitas daerah dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah.
 3. *Tax effort*, dan belanja pegawai secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian pembangunan daerah. Hal ini

mengindikasikan bahwa Jika Pemerintah Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat mampu menggali PAD nya serta alokasi belanja pegawai mampu memotivasi perangkat daerah untuk memiliki produktivitas kinerja yang baik maka Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat akan mampu mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Saran

1. Mengoptimalkan penerimaan daerah dari pajak bumi bangunan, pajak orang pribadi dalam negeri, pph pasal 21, pajak ekspor, dan pph badan.
2. Melakukan penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pemungutan.
3. Melakukan studi banding dengan Kabupaten/kota yang telah mandiri

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul, Halim.2007. Otonomi Daerah dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah *and Fiscal Stress*. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, Vol 16, No 1 Hal: 40-61
2. Joko, Haryanto. 2005. Kemandirian Daerah Sebuah Perspektif Dengan Metode Path Analysis". Simposium Riset Ekonomi II. Surabaya.
3. Saprudin.2011.Pengaruh Upaya Pajak (tax effort) dan belanja pegawai terhadap kemandirian pembangunan daerah.*Skripsi*. Universitas Pasundan Bandung.
4. Saragih,Juli Panglima.2003.*Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Gahalia Indonesia.
5. Shamsub, Hannarong., Joseph B Akoto. 2004. *State and Local Fiscal Structures Tingkat II*, Jurnal Ekonomi Pembangunan No.1 Bol, 2 FE UII Yogyakarta.

Tahun 2018	Vol. 5	Nomor 1	Periode Januari - Juni	ISSN : 2356-3923
------------	--------	---------	------------------------	------------------

6. Sukanto Reksohadiprodjo.1999. "*Government of Indonesia Tax Revenues*", JEI, Vol. 14 Nomor 4, 1-3.
7. www.djpk.depkeu.go.id
8. www.Jabar.bps.go.id